

DISERTASI

***COLLABORATIVE GOVERNANCE* DALAM MEWUJUDKAN
KOTA LAYAK ANAK DI KOTA TANJUNGPINANG**

*Collaborative Governance in Realizing Child-Friendly City
in Tanjungpinang City*



Oleh:

DIAH SITI UTARI
1171600017

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2023**

DISERTASI

***COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM MEWUJUDKAN
KOTA LAYAK ANAK DI KOTA TANJUNGPINANG***

*Collaborative Governance in Realizing Child-Friendly City
in Tanjungpinang City*



Oleh:

DIAH SITI UTARI
1171600017

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2023**



**COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM MEWUJUDKAN
KOTA LAYAK ANAK DI KOTA TANJUNGPINANG**

*Collaborative Governance in Realizing Child-Friendly City
in Tanjungpinang City*

DISERTASI

**Untuk Memperoleh Gelar Doktor
Dalam Program Studi Ilmu Administrasi
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**

Oleh:

DIAH SITI UTARI
1171600017

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2023**

DISERTASI INI TELAH DISETUJUI

PADA TANGGAL 13 Juli 2023

Oleh:
Promotor


Prof. Dr. Agus Sukristyanto, MS

NPP. 20120.90.0203

Co-Promotor


Dr. Achluddin Ibnu Rochim, SH, M.Si

NPP.20110.96.0463

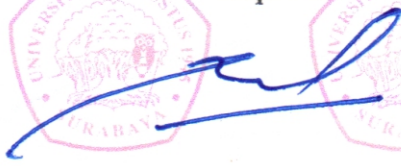
Program Studi Doktor Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Mengetahui
Dekan


Dr. Dra. Ayun Maduwinarti, MP

NPP.20120.87.0103

Mengesahkan
Kaprodi


Prof. Dr. V. Rudy Handoko, MS

NPP.20110.86.0062

TELAH DITETAPKAN PANITIA PENGUJI DISERTASI
PROGRAM DOKTER ILMU ADMINISTRASI
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945
PADA TANGGAL 13 Juli 2023

Panitia Penguji,

Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, MM., CMA., CPA

Dr. Dra. Ayun Maduwinarti, MP

Prof. Dr. Agus Sukristyanto, MS.

Dr. Achluddin Ibnu Rochim, SH., M.Si.

Prof. Dr. V. Rudy Handoko, M.S.

Prof. Dr. Arif Darmawan, SU.

Dr. Dra. Rachmawati Novaria, MM.

Dr. Falih Suaedi, M.Si.

Prof. Dr. Roesminingsih, M.Pd.

Dr. Abdul Halik, MM



Program Studi Doktor Ilmu Administrasi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP)

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Mengetahui

Mengesahkan

Dekan

Kaprodi



Dr. Dra. Ayun Maduwinarti, MP

Prof. Dr. V. Rudy Handoko, MS

NPP.20120.87.0103

NPP.20110.86.0062

PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Diah Siti Utari

NIM : 1171600017

Program Studi : Doktor Ilmu Administrasi

Menyatakan bahwa disertasi yang saya buat dengan judul:

”Collaborative Governance dalam Mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Tanjungpinang”

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan duplikasi dari karya orang lain. Dalam naskah disertasi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah ditujukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan daftar pustaka. Apabila ternyata di dalam naskah disertasi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 13 Juli 2023

Hormat saya,



Diah Siti Utari



**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai Civitas Akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Diah Siti Utari
 NBI/ NPM : 1171600017
 Fakultas : FISIP
 Program Studi : Doktor Ilmu Administrasi
 Jenis Karya : Skripsi/ Tesis/ Disertasi/ Laporan Penelitian/Praktek*

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya **Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)**, atas karya saya yang berjudul:

.....
 Collaborative Governance dalam Mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Tanjung

 pinang (Collaborative Governance in Realizing Child - Friendly City in
 Tanjungpinang City)

Dengan **Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty - Free Right)**, Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau memformatkan, mengolah dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap tercantum

Dibuat di : ..Tanjungpinang.....
 Pada tanggal : ...18 Juli 2023.....

Yang Menyatakan,



*Coret yang tidak perlu

ABSTRAK

Dalam menghadapi kompleksitas masalah perkembangan yang dinamis untuk mewujudkan kota layak anak di Kota Tanjungpinang, maka diperlukan tata kelola kolaborasi antara pemerintah daerah dengan stakeholders lainnya di luar pemerintah yang bersifat pentahelix. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tata kelola kolaborasi (*Collaborative Governance*) yang telah berjalan, peran dari pemerintah daerah, dunia usaha, lembaga pendidikan, masyarakat, media massa serta model kolaborasi yang berpotensi untuk dapat dikembangkan sebagai bentuk pengembangan kolaborasi yang telah berjalan selama ini. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat Quasi Kualitatif (deskriptif kualitatif). Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan beberapa metode yang meliputi observasi, wawancara, metode dokumenter, metode audio-visual, dan metode penelusuran data online. Informan terbagi atas informan kunci, informan utama dan informan tambahan. Informan dalam penelitian ini berjumlah 36 orang yang berasal dari organisasi pemerintah daerah, organisasi di luar pemerintah daerah yang terlibat sebagai mitra kolaborasi serta masyarakat sebagai peserta kegiatan. Penelitian ini menggunakan teori kolaborasi dari Chris Ansell & Alison Gash sebagai pisau analisis yang digunakan untuk menjelaskan *Collaborative Governance* dalam mewujudkan kota layak anak di Kota Tanjungpinang. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah menjalankan perannya mencakup fasilitator, koordinator, stimulator, dan dinamisator. Dunia usaha, lembaga pendidikan, NGO (khususnya Forum PUSPA, Relawan SAPA dan PATBM), serta media massa telah melaksanakan perannya. Namun masih ada beberapa kondisi yang berpotensi sebagai penghambat *Collaborative Governance* pada kebijakan kota layak anak ini. Terdapat potensi pengembangan model kolaborasi antar NGO baik yang bergabung dalam bentuk forum maupun di luar forum, serta dunia usaha dan Perguruan Tinggi. Hasil penelitian menyarankan perlunya konfigurasi sumber daya dari berbagai latar organisasi berbeda yang bergabung dalam sebuah forum, komposisi dominasi keanggotaan forum, diversifikasi media komunikasi, dan koordinasi yang lakukan untuk mendukung kegiatan yang bertujuan bagi upaya pemenuhan hak anak. Hal tersebut diperlukan mengingat bahwa kelompok sasaran adalah anak yang termasuk generasi Z dan Alpha yang memiliki karakteristik akrab dengan teknologi.

Kata kunci: tata kelola kolaborasi, pentahelix, peran, model kolaborasi.

ABSTRACT

A penta helix is needed in collaborative governance between the local government and other stakeholders outside of the government to effectively handle complex issues related to dynamic development to create a child-friendly city in Tanjungpinang City. This study aims to describe existing collaborative governance, the role of local government, the business world, educational institutions, the public, the mass media, and collaboration models that have the potential to be developed as a form of collaborative development. This is a quasi-qualitative (descriptive qualitative) study. Data was collected using a variety of methods, including observation, interviews, documentary methods, audio-visual methods, and online data tracking methods. Informants are classified as key informants, main informants, and additional informants. This study included 40 informants from local government organizations, organizations outside of local government that were involved as collaborative partners, and community members who participated in activities. The collaboration theory of Chris Ansell and Alisson Gash is used in this study as an analytical tool to explain collaborative governance in the creation of child-friendly cities in Tanjungpinang City. According to the research findings, local governments have fulfilled their roles as facilitators, coordinators, stimulators, and dynamic actors. Businesses, academic institutions, NGOs (particularly the PUSPA Forum, Relawan SAPA, and PATBM), and the mass media have all contributed. However, several conditions could become impediments to Collaborative Governance in this child-friendly city policy. There is potential for the development of collaborative models between NGOs that participate in forums and outside forums, as well as the business sector and colleges. The study's findings point to the need for resource configuration from various organizational backgrounds that join a forum, the dominating composition of forum membership, diversification of communication media, and coordination to support activities aimed at fulfilling children's rights. This is needed considering that the target group consists of children from the Z and Alpha generations who are tech-savvy.

Keywords: collaboration governance, collaboration model, penta helix, role

KATA PENGANTAR

Dengan menghaturkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan keridhoan-Nya menuntun penulis melewati proses sehingga akhirnya penulisan disertasi ini dapat selesai dengan judul *Collaborative Governance dalam Mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Tanjungpinang*.

Penelitian disertasi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan kelulusan dalam menempuh Program Studi Strata 3 (S3) Doktor Ilmu Administrasi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Penulis menyadari bahwa proses penyelesaian disertasi ini melibatkan berbagai pihak baik yang telah memberikan kontribusi secara langsung maupun tidak langsung. Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi, terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, MM., CMA., CPA. selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah memberikan kesempatan dan motivasi pada penulis untuk menyelesaikan perkuliahan pada Program Doktor Ilmu Administrasi.
2. Bapak Prof. Dr. Agus Sukristyanto, MS selaku Promotor yang telah sabar memberikan bimbingan dan arahan serta support selama ini sehingga disertasi ini dapat terselesaikan dengan baik.
3. Bapak Dr. Achluddin Ibnu Rochim, SH, Msi selaku ko-promotor yang telah memberikan bimbingan dan motivasi sehingga disertasi ini dapat diselesaikan.
4. Bapak Prof. Dr. V. Rudy Handoko, MS selaku Ketua program studi Doktor Ilmu Administrasi yang senantiasa memberikan arahan, saran, motivasi serta support pada penulis sehingga disertasi ini dapat diselesaikan.
5. Bapak/Ibu para penguji proposal, yakni Prof. Dr. Agus Sukristyanto, MS, Dr. Achluddin Ibnu Rochim, SH., M.Si., Prof. Dr. V. Rudy Handoko, MS, dan Prof. Dr. Arif Darmawan, SU., terima kasih telah memberikan kritik, saran dan masukan yang membangun dan sangat penting dalam penulisan disertasi ini.

6. Bapak/Ibu para panitia pengujian finalisasi, ujian tertutup dan terbuka, yakni Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, MM., CMA., CPA, Dr. Dra. Ayun Maduwinarti, MP, Prof. Dr. Agus Sukristyanto, MS., Dr. Achluddin Ibnu Rochim, SH., M.Si., Prof. Dr. V. Rudy Handoko, M.S., Prof. Dr. Arif Darmawan, SU., Dr. Dra. Rachmawati Novaria, MM., Dr. Falih Suaedi, M.Si., Prof. Dr. Roesminingsih, M.Pd., dan Dr. Abdul Halik, MM, terima kasih atas kritik, saran, dan masukan yang membangun dan sangat penting dalam penulisan disertasi ini.
7. Bapak/Ibu pengujian akademik yang telah berkenan meluangkan waktunya di ujian terbuka.
8. Seluruh dosen dan karyawan FISIP Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang turut memberikan kontribusi pada penulis baik langsung maupun tidak langsung sehingga penulisan disertasi ini dapat terselesaikan, khususnya Bapak Supri dan ibu Inna, peneliti mengucapkan terima kasih atas bantuan informasinya.
9. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Kota Tanjungpinang beserta jajarannya, atas ijin yang diberikan. Kepada Kepala UPTD PPA, Pimpinan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) beserta jajarannya, Pembina dan Pengurus Forum Anak Kota Tanjungpinang atas kesediaannya membantu data sekunder dan diwawancarai yang bermanfaat bagi hasil penelitian sehingga penulis dapat menyelesaikan disertasi ini.
10. Ketua Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) Kota Tanjungpinang beserta para pengurus atas ijin yang diberikan dan kebersamaan selama ini sehingga penulis dapat menyelesaikan disertasi ini.
11. Ketua Relawan Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) beserta pengurus lainnya baik yang berada di Kelurahan Melayu Kota Piring maupun Kelurahan Bukit Cermin.
12. Lurah Melayu Kota Piring, Bukit Cermin, Batu IX, Dompok, Air Raja, Kampung Bulang, Sei Jang beserta jajarannya atas izin yang diberikan kepada peneliti untuk menemui pengurus PATBM Kelurahan sehingga dari hasil penelitian ini dapat membantu penulisan dalam menyelesaikan disertasi ini.
13. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) Kota Tanjungpinang sekaligus Ketua gugus Tugas kota Layak Anak Kota Tanjungpinang atas kesediaannya

diwawancarai dan membantu data sekunder yang diperlukan sehingga dapat membantu penulis dalam menyelesaikan disertasi ini.

14. Kepala Dinas Pendidikan kota Tanjungpinang beserta jajarannya atas kesediaannya diwawancarai dan membantu data sekunder yang diperlukan sehingga membantu penulis dalam menyelesaikan disertasi ini.
15. Ketua PATBM Kelurahan Melayu Kota Piring, Bukit Cermin, Dompok, Seijang, Batu IX, Air Raja dan Kampung Bulang beserta para pengurus atas ijin yang diberikan sehingga dari hasil penelitian ini dapat membantu penulisan dalam menyelesaikan disertasi ini
16. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Raja Haji, Ketua Program Studi Administrasi Publik (Bapak Raja Abu Manshur Matrudi, MPM), Bapak Ibu dosen dan pegawai yang telah memberikan dukungan, kesempatan hingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
17. Kedua orang tua penulis ayahanda Alm.H.M.R. Sofwan dan Ibunda almh. Oeminarti yang semasa hidupnya senantiasa memberikan doa dan dukungan penuh atas perjuangan penulis menempuh pendidikan pada program Doktor Ilmu Administrasi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
18. Mas Wien dan Mbak Lena, Mas Zai serta ponakanku Aisyah dan Iga yang senantiasa memberikan motivasi dan dukungan langsung maupun tidak langsung sehingga penulis tetap semangat menyelesaikan disertasi ini
19. Keluarga besar (mas dan mbak, adik) yang dikasihi yang senantiasa mendoakan peneliti sehingga disertasi ini dapat terselesaikan.
20. Rekan-rekan mahasiswa pada program studi Doktor Ilmu Administrasi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya khususnya Bapak Dr. Astina, Bapak Dr. Dayat, Bapak Dr. Karol, Ibu Dwi, Pak Yudi yang memberikan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan disertasi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan pahala yang berlipat ganda atas semua amal kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dalam penyelesaian disertasi ini. Penulisan disertasi ini juga dari pada kesempurnaan, sumbang saran konstruktif dari semua pihak sangat penulis harapkan.

Akhirnya dengan kerendahan hati penulis mengharapkan masukan, koreksi dan saran untuk memperkuat kelemahan dan melengkapi kekurangan tersebut dari semua pihak.

Tanjungpinang, 13 Juli 2023
Penulis,

Diah Siti Utari

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH	v
HALAMAN PRASYARAT GELAR	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR SINGKATAN	xxi
DAFTAR GLOSSARY	xxii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah Penelitian.....	16
1.3 Tujuan Penelitian.....	16
1.3.1 Tujuan Umum.....	16
1.3.2 Tujuan Khusus.....	17
1.4 Manfaat Penelitian.....	17
1.4.1 Manfaat secara Teoritis.....	17
1.4.2 Manfaat secara Praktis.....	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
2.1 Penelitian Terdahulu.....	19
2.2 Teori Yang Digunakan.....	35

2.2.1	Paradigma Administrasi Publik	35
2.2.2	Paradigma <i>Governance</i>	42
2.2.3	<i>Collaborative Governance</i>	49
2.2.4	<i>Non-Governmental Organization</i> (NGO)	71
2.3	<i>Critical Review</i>	75
BAB III	PROSEDUR PENELITIAN	81
3.1	Landasan Filosofi dan Pendekatan Penelitian.....	81
3.2	Masalah Penelitian.....	82
3.3	Lokasi Penelitian	83
3.4	Penetapan Objek dan Penetapan Informan Penelitian.....	84
3.5	Metode Pengumpulan Data.....	84
3.6	Proses Pengumpulan Data	86
3.7	Teknik Analisa Data	86
3.8	Tringulasi Data Penelitian	89
3.9	Teknik Keabsahan Data	89
BAB IV	DESKRIPSI SUBJEK DAN OBJEK PENELITIAN	92
4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	92
4.2	Kebijakan Kota Layak Anak Tanjungpinang.....	93
4.3	Keterlibatan Pemerintah Daerah dan <i>Stakeholders</i> di Luar Pemerintah (<i>Non-State</i>).....	111
4.3.1	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Kota Tanjungpinang.....	111
4.3.2	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) Kota Tanjungpinang	112
4.3.3	Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang	113
4.3.4	Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak.....	114
4.3.5	Relawan Sahabat Perempuan dan Anak.....	121
4.3.6	Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat	125
4.3.7	Dunia usaha.....	127
4.3.8	Lembaga Pendidikan (Perguruan Tinggi)	128

4.3.9	Media Massa	128
4.3.10	Forum Anak	130
BAB V PERAN PEMERINTAH DAERAH DAN ORGANISASI DI LUAR PEMERINTAH.....		133
5.1	Peran Pemerintah Daerah.....	133
5.1.1	Peran sebagai Fasilitator	134
5.1.2	Peran sebagai Koordinator.....	136
5.1.3	Peran sebagai Stimulator.....	141
5.1.4	Peran sebagai Dinamisator.....	142
5.1.5	Peran sebagai Pembina	143
5.2	Peran Organisasi di Luar Pemerintah Pemerintah Daerah	145
5.2.1	<i>Non-Governmental Organizations</i> (NGOs).....	145
5.2.2	Peran Dunia Usaha.....	161
5.2.3	Peran Lembaga Pendidikan.....	164
5.2.4	Peran Media Massa.....	166
5.2.5	Peran Forum Anak sebagai Perwakilan Anak.....	168
BAB VI MODEL KOLABORASI DALAM COLLABORATIVE GOVERNANCE.....		173
6.1	Tata Kelola Kolaborasi	173
6.1.1	Kondisi Awal	173
6.1.2	Bentuk Kelembagaan	178
6.1.3	Kepemimpinan.....	181
6.1.4	Proses Kolaborasi.....	182
6.1.5	Outcomes	191
6.2	Model Kolaborasi yang Terjadi Saat ini dan Model Pengembangan	197
6.2.1	Dasar Legitimasi Kolaborasi.....	197
6.2.2	Kondisi <i>Existing</i> dan Model Pengembangan Antara Pemda dengan Organisasi di Luar Pemerintah	216
6.2.3	Kondisi <i>Existing</i> dan Model Pengembangan Antar Organisasi di Luar Pemerintah	221
BAB VII TEMUAN PENTING, IMPLIKASI PENELITIAN DAN		

PREPOSISI	238
7.1 Temuan Penting	238
7.2 Implikasi Penelitian	240
7.2.1 Implikasi Teoritis	240
7.2.2 Implikasi Praktis	242
7.3 Preposisi.....	243
BAB VIII PENUTUP	244
8.1 Kesimpulan.....	244
8.2 Saran.....	246
DAFTAR PUSTAKA.....	248
LAMPIRAN.....	257

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1:	Daftar Penelitian Terdahulu.....	19
Tabel 2.2:	Perbandingan Government dengan Governance.....	39
Tabel 2.3:	Perbandingan Model NPM dan Governance	42
Tabel 2.4:	Konsep Governance oleh Menurut Para Ahli	47
Tabel 2.5:	Critical Review.....	76
Tabel 2.6:	Theoretical Gap.....	79
Tabel 4.1:	Keterlibatan Organisasi Non-State (di luar pemerintah) dalam Kluster Pemenuhan Hak Anak.....	96
Tabel 4.2:	Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Penyampaian Hasil Evaluasi KLA Tahun 2022	101
Tabel 4.3:	Persentase Capaian Indikator KLA Kota Tanjungpinang tahun 2021	101
Tabel 4.4:	Pengurus PUSPA Gurindam periode kedua berdasarkan Surat Keputusan WaliKota Tanjungpinang Nomor 535 Tahun 2022 tentang Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak Periode 2022 - 2024	119
Tabel 4.5:	Kabupaten/Kota Wilayah Model Ramah Perempuan dan Peduli Anak di Indonesia berdasarkan permen PPPA Nomor 70 Tahun 2021.....	122
Tabel 5.1:	Beberapa Kegiatan yang diselenggarakan Forum PUSPA Kota Tanjungpinang yang Berfokus pada Pemberdayaan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak.....	147
Tabel 5.2:	Beberapa Kegiatan Forum Anak Kota Tanjungpinang sebagai Pelopor, pelapor dan partisipasi dalam Musrenbang	169
Tabel 6.1:	Perbedaan Karakteristik NGO dalam Kebijakan Kota Layak Anak di Kota Tanjungpinang.....	179
Tabel 6.2:	Perbandingan dasar hukum pembentukan Forum PUSPA di beberapa daerah kabupaten/kota dengan dan Komposisi Forum	180

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1:	Diagram Jumlah Dispensasi Nikah Tahun 2019-2021	13
Gambar 1.2:	Diagram Klasifikasi Kekerasan terhadap Anak	14
Gambar 1.3:	Jumlah Kekerasan terhadap Anak Kota Tanjungpinang pada Tahun 2022	15
Gambar 2.1	Aktor dalam Collaborative Governance	59
Gambar 2.2:	Siklus Kolaborasi	62
Gambar 2.3:	Model Tata Kelola Kolaboratif	63
Gambar 2.4:	Model Tata Kelola Kirk Emerson, Tina Nabacahi dan Stephen Balogh	69
Gambar 3. 1:	Komponen Data Analisis dalam Model Interaktif	87
Gambar 4.1:	Peta Wilayah Kota Tanjungpinang	92
Gambar 4.2:	Bagan Peringkat KLA berdasarkan Permen PPPA Nomor 12 Tahun 2022	99
Gambar 4.3:	Penyampaian Hasil Evaluasi KLA Tahun 2021	100
Gambar 4.4:	Data Kepemilikan KIA Usia 0-18 Kota Tanjungpinang 2021-2022	103
Gambar 4.5:	Kunjungan siswa SMPN 15 yang berkaitan dengan pengenalan teknologi dalam mengakses informasi dan siswa SDN 013 dalam kegiatan belajar literasi	103
Gambar 4.6:	Pemanfaatan Perpustakaan Keliling oleh Forum Anak dan Pusat Informasi Sahabat Anak	104
Gambar 4.7:	SK Kepala Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang Nomor 42 Tahun 2022	105
Gambar 4.8:	Deklarasi Masjid Ramah Anak Kota Tanjungpinang	105
Gambar 4.9:	Data Taman Se-Kota Tanjungpinang Tahun 2023	106
Gambar 4.10:	Data Pendukung Pemenuhan Hak Anak Untuk Kesehatan Dasar	107
Gambar 4.11:	Dokumen Capaian Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)	108
Gambar 4.12:	Data LKSA (2022)	109
Gambar 4.13:	Sekolah Ramah Anak pada semua Jenjang Pendidikan di Kota Tanjungpinang Tahun 2023	110
Gambar 4.14:	Fasilitas Publik yang Dapat Digunakan untuk Kegiatan Kreatif dan Rekreatif Anak	110
Gambar 4.15:	Logo Forum Anak	132

Gambar 5.1:	SK Pembentukan TIM SAPA Kelurahan Melayu Kota Piring	152
Gambar 5.2:	SK Pembentukan Kepengurusan Aktivis/ Relawan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Tingkat Rukun Warga dan Kelurahan Melayu Kota Piring	158
Gambar 6.1:	SK Walikota Nomor 636 Tahun 2022 Dan Struktur Panitia.....	192
Gambar 6.2:	Dokumen Nota Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Tanjungpinang dan STIE Pembangunan Kota Tanjungpinang	199
Gambar 6.3:	Dokumen Nota Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Tanjungpinang dan UMRAH	201
Gambar 6.4:	Perjanjian Kerjasama antara DP3APM dengan Dewan Mesjid Kota Tanjungpinang.....	203
Gambar 6.5:	Keputusan Wali Kota Tanjungpinang tentang Forum PUSPA Periode Tahun 2022-2024.....	204
Gambar 6.6:	SK Pembentukan Kepengurusan Aktivis/ Relawan PATBM Tingkat Rukun Warga dan Kelurahan Melayu Kota Piring	205
Gambar 6.7:	SK Pembentukan TIM SAPA Kelurahan Melayu Kota Piring	206
Gambar 6.8:	Bukti Kerjasama Disdukcapil Kota Tanjungpinang dengan Forum Anak dibawah Pembinaan Bidang Perlindungan Anak.....	207
Gambar 6.9:	Dokumen Perjanjian Kerjasama antara Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang Organisasi Non Publik (PTMSI)	208
Gambar 6.10:	Surat Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kelurahan Bukit Cermin dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	210
Gambar 6.11:	Collaborative Governance dalam Mewujudkan Kota Layak Anak dengan Melibatkan Elemen Penta Helix	217
Gambar 6.12:	Model Kolaborasi Existing Antara Pemerintah Daerah dengan Perguruan Tinggi	218
Gambar 6.13:	Model Kolaborasi yang Dikembangkan Antara Pemerintah Daerah dengan Perguruan Tinggi	219

Gambar 6.14: Model Kolaborasi (Existing) Antara NGO-NGO	223
Gambar 6.15: Model Kolaborasi NGO-NGO yang Dikembangkan	223
Gambar 6.16: Model Kolaborasi Existing yang Mendukung KLA dengan Melibatkan Dunia Usaha	228
Gambar 6.17: Model Kolaborasi yang Dikembangkan dalam Mendukung KLA dengan Melibatkan Dunia Usaha	229
Gambar 6.18: Adaptasi Model Collaborative Governance Ansel & Gash dalam Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak	233

DAFTAR SINGKATAN

DP3APM	: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat
Bappelitbang	: Badan Perencanaan, Pengembangan, Penelitian
PUSPA	: Partisipasi Perempuan untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak
PATBM	: Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat
SAPA	: Sahabat Perempuan dan Anak
PTMSI	: Persatuan Tennis Meja Seluruh Indonesia
KLA	: Kabupaten/Kota Layak Anak
PKIE	: Promosi, Komunikasi, Informasi, Edukasi
ILA	: Informasi Layak Anak
IDOLA	: Indonesia Layak Anak
HIMPAUDI	: Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia
KPPPA	: Kementerian Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
BPTA	: Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak
ABH	: Anak Berhadapan dengan Hukum
NAPZA	: Narkotika, Psikotropika dan Zat terlarang
HIV/AIDS	: <i>Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immunodeficiency Syndrome</i>
BKKBN	: Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional
CSR	: <i>Corporate Social Responsibility</i>
APSAI	: Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
BUMD	: Badan Usaha Milik Daerah
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat

DAFTAR GLOSSARY

- Tata kelola kolaborasi : Sebuah pemerintahan dimana satu atau lebih lembaga/organisasi publik secara langsung mengikutsertakan pemangku kepentingan dari luar pemerintahan (*non-state*) dalam proses pengambilan kolektif yang formal, berorientasi konsensus, dilaksanakan secara musyawarah dan bertujuan untuk melaksanakan kebijakan publik.
- Pentahelix : Multi pihak yang mana unsur pemerintah, akademisi, badan atau dunia usaha, masyarakat atau komunitas dan media berkolaborasi, berkomitmen dan berkoordinasi dalam melaksanakan inovasi dalam hal ini untuk melaksanakan kebijakan publik.
- Pemerintah Daerah : Kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- Organisasi Publik : Organisasi pada sektor publik yang bertujuan memberikan pelayanan publik dan berorientasi pada kepentingan publik yang salah satunya adalah institusi pemerintahan baik berbentuk Badan maupun Dinas.
- Organisasi Non-Publik/ organisasi non pemerintah : Organisasi profesi, dunia usaha, Lembaga Swadaya Masyarakat
- Peraturan Daerah : Peraturann perundang-undangan yang dibentuk bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Kepala Daerah baik di Provinsi maupun Kabupaten/ Kota

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1:	Surat Ijin Penelitian	258
Lampiran 2:	Surat Izin Penelitian dari Kesbangpolpenmas Kota Tanjungpinang.....	264
Lampiran 3:	Surat Selesai Penelitian	265
Lampiran 4:	Bukti Kegiatan Wawancara Peneliti dengan Informan	274
Lampiran 5:	Keterlibatan Peneliti sebagai Observer Partisipan.....	281
Lampiran 6:	Daftar Nama Informan	285
Lampiran 7:	Dokumen Pendukung	289
Lampiran 8:	Bukti Peran Pemda dalam Bentuk Kegiatan.....	297
Lampiran 9:	Bukti Peran Forum PUSPA Kota Tanjungpinang dalam Bentuk Kegiatan	300
Lampiran 10:	Rencana Aksi Forum PUSPA Tahun 2023 dari Hasil Pengembangan Model Kolaborasi.....	302
Lampiran 11:	Bukti Peran Relawan SAPA dalam Bentuk Kegiatan	308
Lampiran 12:	Bukti Peran PATBM dalam Bentuk Kegiatan.....	310
Lampiran 13:	Bukti Peran Media Massa dalam Bentuk Publikasi dan Kegiatan	312
Lampiran 14:	Bukti Peran Dunia Usaha dalam Bentuk Kegiatan....	320
Lampiran 15:	Peran Forum Anak Kota Tanjungpinang dalam Bentuk Kegiatan dan Publikasi	321
Lampiran 16:	Dokumentasi Pendukung Kolaborasi (Outcomes).....	324